
KUNCI SUKSES KOMITE AUDIT

Ataina Hidayati*

Abstrak

Dalam tulisan yang dimuat dalam Jurnal Bisnis dan Akuntansi edisi Agustus 1999, telah dijelaskan tentang peran dan fungsi komite audit secara normatif maupun hasil penelitian yang menunjukkan kinerja komite tersebut. Kali ini penulis mencoba membahas lebih lanjut topik tentang komite audit, dengan pokok permasalahan faktor-faktor apa saja yang mendorong agar komite tersebut bisa mencapai kinerja seperti yang diharapkan. Menurut penulis ada beberapa faktor yang menentukan kesuksesan komite, yang bisa digolongkan dalam faktor fundamental, faktor primer dan faktor sekunder. Karena terbatasnya literatur yang menunjukkan bagaimana praktik komite audit di Indonesia, dalam membahas topik ini penulis mendasarkan pada literatur yang bersifat normatif maupun berbagai hasil penelitian yang bersifat empiris atas praktik di Amerika.

PENDAHULUAN

Secara formal komite audit diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1995, melalui SK Direksi Bank Indonesia, yang mewajibkan kepada bank-bank di Indonesia untuk membentuk komite tersebut. Di Amerika, komite tersebut sudah dikenal secara resmi sejak tahun 1937, melalui usulan dari AICPA. Sejak tahun 1940an *Securities and Exchange Commission (SEC)* secara informal telah mendukungnya dan kemudian tahun 1979, SEC mengakuinya secara resmi dengan mensyaratkan kepada semua perusahaan yang menjual saham di pasar modal untuk membentuk komite audit.

Timbulnya konsep komite audit merupakan fenomena untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian (*control system*) perusahaan pada level *corporate governance*. Sebagai bagian dari *corporate board* (dewan komisaris), pada sebagian besar perusahaan di Amerika, terdapat juga komite lain seperti komite kompensasi/personalia, *nominating committee* (yang bertugas merumuskan strategi dan evaluasi kinerja manajemen), *search committee* (bertugas mencari direktur atau manajer baru), serta berbagai komite khusus. Komite khusus tersebut sifatnya sementara, yang dibentuk untuk tugas tertentu, dan akan dibubarkan segera setelah tugas selesai. Struktur dewan komisaris yang membawahi berbagai komite dan biasanya masing-masing komite akan dipimpin oleh seorang direktur, sering disebut dengan struktur *lead director* (Jadick 1994).

Seiring dengan berjalannya waktu, banyak harapan yang dibebankan pada komite tersebut, terutama perannya untuk melindungi hak-hak pemegang saham. Di pihak lain, banyak kritik dan saran yang dilontarkan karena komite tersebut dianggap belum berfungsi sebagaimana mestinya.

* Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Penelitian empiris yang berhubungan dengan komite tersebut menimbulkan berbagai pandangan dan pemikiran untuk meningkatkan efektivitas komite audit. Salah satu tulisan yang mendorong penulis untuk mengangkat topik ini adalah artikel yang ditulis Eugene Al Katz yang berjudul "Keys to Effective Audit Committee" yang dimuat dalam majalah *Credit World*, edisi Maret/April, 1998. Al Katz berpendapat ada lima faktor yang mempengaruhi efektivitas komite audit, yaitu: 1) pernyataan secara tertulis tugas dan misi komite, 2) pemimpin komite yang kuat, 3) hubungan yang baik dengan internal auditor, 4) hubungan yang baik dengan eksternal auditor, 5) evaluasi kinerja. Menurut pendapat penulis, apa yang dikemukakan Al Katz tersebut belum memasukkan faktor yang lebih fundamental, yaitu komposisi komite audit. Selanjutnya dalam tulisan ini penulis juga mengemukakan faktor sekunder yang menentukan kesuksesan komite audit, yaitu pertemuan (*meeting*) antar anggota komite dan berbagai pihak yang berkepentingan, yang sifatnya formal maupun informal. Dalam tulisan ini penulis menggolongkan tiga faktor yang menentukan efektivitas komite audit, yaitu faktor fundamental, faktor primer, dan faktor sekunder. Adapun elemen masing-masing faktor tersebut akan dijelaskan pada uraian selanjutnya.

FAKTOR FUNDAMENTAL : KOMPOSISI OPTIMAL

Menurut penulis, faktor yang paling mendasar atas kesuksesan komite audit adalah komposisinya. Komposisi merupakan faktor yang fundamental karena faktor tersebut mendasari berbagai faktor yang lain. Yang dimaksud dengan komposisi di sini mencakup dua hal, yang pertama adalah "asal" anggota komite tersebut, seperti apa yang dijelaskan oleh Baysinger dan Butler, yang termuat dalam Vicknair et al. (1993). Menurut mereka, komposisi anggota dewan komisaris bisa terdiri dari *insider*, *independent outsider* dan *grey area*. Adapun faktor kedua adalah komposisi anggota komite menurut jenis keahlian yang harus dimiliki.

Insider, Independent Outsider atau Grey Area ?

Pengertian *insider* adalah anggota komite yang berasal dari dalam perusahaan, atau merupakan karyawan perusahaan. Adapun *independent outsider* adalah anggota komite yang bukan karyawan perusahaan atau afliasinya, bukan merupakan pemasok utama atau bukan merupakan konsumen utama, bukan konsultan perusahaan dan bukan karyawan perusahaan dalam dua tahun terakhir (Corporate Board, Maret/April 1994). Adapun yang dimaksud dengan *grey area* adalah anggota komite yang bukan karyawan perusahaan tetapi tidak bisa digolongkan sebagai *independent outsider* karena adanya keterkaitan dengan perusahaan. Dari ketiga pihak tersebut, *independent outsider* yang selayaknya menduduki jabatan komite

audit. Hal ini sesuai dengan pendapat Fama dan Jensen yang termuat dalam Beasley (1996) yang mengemukakan bahwa dewan komisaris mempunyai tanggung jawab tertinggi dalam mengendalikan mekanisme pengendalian internal untuk memonitor aktivitas manajemen. Mereka berargumentasi bahwa pihak luarlah yang tepat untuk menjalankan fungsi monitoring ini. Dominasi pihak dalam (manajemen) pada komite audit bisa mendorong kolusi yang merugikan kepentingan pemegang saham.

Pendapat yang mengharuskan agar anggota komite adalah pihak luar juga didukung oleh SEC dan *New York Stock Exchange (NYSE)*. Sejak 1978, NYSE mensyaratkan semua perusahaan yang *listing* harus mempunyai komite audit dengan anggota semuanya berasal dari luar perusahaan, yang mereka sebut dengan *independent director*. *National Association of Securities Dealer* menerapkan aturan yang lebih lunak dengan mengharuskan kepada perusahaan yang *listing* di NASDAQ (*over the counter market*) mempunyai komite audit dengan anggota paling tidak mayoritas pihak luar. *American Stock Exchange* meskipun tidak mengharuskan komite audit dengan anggota *independent director*, tetapi sangat mendukung hal tersebut. Di Connecticut, salah satu negara bagian di Amerika, setiap perusahaan dengan pemegang saham lebih besar dari 100 diharuskan memiliki komite audit dengan anggota paling tidak 1 *independent director* (Sommer 1991).

Berbagai penelitian yang meneliti pengaruh komposisi komite audit juga menunjukkan dukungannya atas anggota komite yang merupakan *independent director*. Menurut Baysinger dan Butler (1985) yang termuat dalam Vicknair et al. (1993) menunjukkan bahwa perusahaan yang proporsi *independent director*nya lebih tinggi, tingkat ROInya tinggi. Wiesbach (1988) menunjukkan bahwa semakin tinggi komposisi *independent director*, makin besar terjadi pergantian CEO (*chief executive officer*) setelah periode yang menunjukkan memburuknya kinerja perusahaan. Rosenstein dan Wayatt (1990) menemukan bahwa pemegang saham bisa naik *abnormal return*nya, jika komposisi *outside director* meningkat. Lee et al. (1992) menemukan bahwa kemakmuran pemegang saham meningkat jika komite audit didominasi oleh pihak luar. Pengeluaran untuk pembayaran gaji secara negatif berhubungan dengan naiknya persentase pihak luar yang masuk dalam komite audit (Brickley dan James 1987). Beasley (1996) menyatakan bahwa komposisi komite audit dengan anggota *outside director* yang lebih besar, akan menurunkan *financial statement fraud*.

Meskipun banyak dukungan akan perlunya seluruh anggota komite adalah *independent director*, ternyata tidak semua perusahaan menerapkannya. Vicknair et al. (1993) melakukan penelitian untuk periode 1980-1987 pada 100 perusahaan di NYSE menunjukkan bahwa 75 % komite audit mempunyai paling tidak satu anggota yang termasuk dalam *grey area*; 25 % komite mempunyai *grey area director* dengan suara mayoritas. Dari 418 anggota komite, 32 % bisa diklasifikasikan sebagai *grey*

area director. Dari berbagai temuan tersebut menunjukkan adanya potensi yang mengancam independensi komite.

Kualifikasi Anggota Komite

Price Waterhouse sebuah komite yang dibentuk oleh *Institute of Internal Auditors Research Foundation*, merekomendasikan paling tidak satu anggota komite audit harus mempunyai latar belakang pelaporan keuangan, akuntansi dan auditing. Menurut penulis, satu anggota saja nampaknya tidak cukup. Dalam situasi yang semakin kompleks dan cepat berubah, seseorang tidak mungkin memahami semua hal dalam lingkup yang luas. Price Waterhouse juga merekomendasikan, paling tidak satu anggota memahami industri dimana perusahaan berada. Saran tersebut nampaknya tepat, karena meskipun antar industri mempunyai berbagai persamaan, tetapi banyak hal yang spesifik yang ditemui pada satu industri dan tidak ditemui pada industri lain. Menurut Mautz dan Neary (1979) pihak yang secara umum mempunyai kualifikasi sebagai komite audit adalah *chief executive officer* atau *chief financial officer* perusahaan lain; akuntan publik atau *chief internal auditor* perusahaan lain. Pendapat Mautz dan Neary tersebut didukung oleh Fama dan Jensen (1983) seperti yang termuat dalam Beasley (1996) yang menyatakan bahwa anggota komite audit sebaiknya adalah *top manager* beberapa perusahaan lain.

Untuk menjaga kompetensinya, anggota komite audit harus selalu mengamati perkembangan aturan badan pengawas pasar modal dan berbagai standar yang dikeluarkan profesi akuntansi. Anggota komite perlu mempelajari laporan manajemen bulanan, laporan ke pemegang saham kuartalan, *company press releases* dan berbagai analisis yang relevan.

Studi yang mempelajari kualifikasi anggota komite audit, pernah dilakukan oleh McMullen dan Raghunandan (1996) yang menunjukkan bahwa pada perusahaan yang mengalami masalah pelaporan keuangan hanya 6% perusahaan yang mempunyai komite audit dengan anggota paling tidak satu CPA (*certified public accountant*). Pada perusahaan tanpa masalah pelaporan keuangan, 25% mempunyai komite audit dengan anggota paling tidak satu CPA.

Meskipun banyak pihak yang berpendapat pentingnya kualifikasi anggota komite audit, namun hasil penelitian menunjukkan kenyataan lain. Knapp (1987) menganalisis 149 laporan tahunan perusahaan yang menjadi obyek penelitiannya menyebutkan bahwa anggota komite audit kebanyakan karyawan perusahaan yang lain, karyawan dari organisasi non bisnis atau karyawan yang sudah pensiun. Dua golongan terakhir cenderung enggan untuk berpartisipasi secara aktif dan obyektif terhadap permasalahan pemeriksaan. Anggota komite dengan latar belakang non bisnis nampaknya tidak memiliki kemampuan dasar yang diperlukan sebagai anggota komite

sedangkan karyawan yang sudah pensiun, kemungkinan kurang bisa mengikuti perubahan kondisi bisnis.

FAKTOR PRIMER

Dalam tulisan ini, penulis berpendapat bahwa kelima kunci sukses komite audit yang dikemukakan oleh Al Katz (1998) merupakan faktor primer, yang kualitasnya sangat ditentukan faktor fundamental. Jika komposisi optimal sudah bisa disusun, diperlukan faktor-faktor lain yang akan mencapai efektivitas komite tersebut. Adapun kelima faktor tersebut akan diuraikan pada bagian berikut ini.

A Charter and a Clear Sense of Mission

Yang disebut dengan *charter* di sini adalah dokumen resmi yang menyatakan besarnya tugas dan wewenang komite audit. Pernyataan misi komite secara tertulis ini diperlukan sebagai *guide* setiap anggota komite untuk tetap menyadari tugas apa yang seharusnya dia lakukan. Meskipun hal ini juga berlaku untuk semua fungsi, nampaknya hal tersebut lebih relevan untuk komite audit dibanding dengan komite yang lain. Selain agar komite selalu ingat tanggung jawabnya, *charter* tersebut bisa dipergunakan sebagai dasar dalam memberikan tanggung jawab lebih kepada komite audit dibanding apa yang seharusnya dia lakukan (Al Katz 1998). Pendapat tersebut didukung oleh Wallace (1985) dan Knapp (1987) yang dimuat dalam Mc. Mullen (1996) yang menyatakan bahwa tidak adanya tanggung jawab yang jelas dan wewenang yang cukup menghalangi efektivitas komite audit.

Adapun tugas utama komite audit menurut Price Waterhouse (1980) yang dimuat dalam Mc.Mullen (1996) adalah meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, yang bisa dicapai dengan: 1) mengawasi proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi sistem pengendalian intern maupun penerapan GAAP; 2) mengawasi proses pemeriksaan internal dan eksternal. Jadi dengan kata lain, keberadaan komite audit diharapkan bisa: 1) mengurangi ketidaktepatan pengukuran akuntansi yang disengaja maupun tidak disengaja; 2) mengurangi ketidakcukupan *disclosure* yang disengaja maupun tidak disengaja; 3) mengurangi kecenderungan kesalahan yang dilakukan manajemen dan praktik yang melawan hukum. Komite audit dipandang sebagai mekanisme monitoring yang diharapkan mengurangi informasi asimetri antara manajemen, dewan komisaris dan pemegang saham. Dalam penelitiannya, Mc Mullen (1996) menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: adanya komite audit bisa menurunkan tuntutan hukum yang dilakukan pemegang saham karena adanya kesalahan manajemen; lebih jarang dilakukan penyusunan kembali laporan laba rugi kuartalan; lebih jarang tindakan khusus dari SEC; lebih jarang terkena

tuntutan hukum, dan lebih jarang adanya pergantian auditor karena adanya perselisihan antara auditor dan manajemen.

Dalam menjalankan tugasnya komite berhubungan langsung dengan staf pemeriksa internal dan bisa mendengar berbagai permasalahan tentang kelemahan perusahaan. Meskipun demikian perlu diingat bahwa fungsi komite hanyalah menjaga agar pemeriksaan baik internal maupun eksternal berjalan dengan baik. Tindakan koreksi apa yang akan dilakukan adalah tanggung jawab manajemen dengan persetujuan rapat umum pemegang saham.

Sehubungan dengan masalah tanggung jawab komite tersebut (Lear 1996) mengusulkan beberapa peranan baru yang bisa dilakukannya agar tugas komite ini lebih menarik. Menurut Lear, komite audit ini turun peranannya karena tugasnya dipandang membosankan. Semula anggotanya orang yang benar-benar pengalaman, kemudian berubah menjadi orang biasa karena komite lain lebih menarik dan kompleks. Adapun tugas tambahan yang bisa dilakukan komite tersebut antara lain: 1) monitoring teknologi informasi, dengan mengontrol kemajuan teknologi informasi yang dipergunakan perusahaan, menjaga agar perusahaan mempunyai teknologi yang benar-benar kompetitif; 2) penilaian kinerja investasi serta 3) review dan audit proyek-proyek besar.

Pemimpin yang Kuat

Kepemimpinan direktur komite audit sangat mendukung efektivitas komite tersebut. Karena tugasnya mengawasi dua area pemeriksaan, komite mempunyai tugas yang tidak mudah. Komite harus mendukung proses pemeriksaan internal, yang kemungkinan menimbulkan ketegangan dengan manajemen maupun stafnya. Di lain pihak komite harus juga menjembatani perbedaan kepentingan yang timbul antara manajemen dengan akuntan publik. Karena kedudukannya tersebut, komite audit harus dipimpin oleh orang yang benar-benar "kuat" atas tekanan pihak-pihak tertentu. Selain itu, pemimpin komite akan menyusun agenda komite dan melihat seberapa jauh pelaksanaannya, menentukan arah dan efektivitas komite tersebut (Al Katz 1998) secara umum. Direktur komite audit harus menciptakan lingkungan dimana seluruh anggota organisasi memahami bahwa mereka mempunyai tanggung jawab bersama atas kesuksesan perusahaan. Jika mereka bisa memahami, diharapkan lingkungan yang sifatnya *cooperative* akan timbul.

Komunikasi Terbuka dengan Internal Auditor

Hubungan dan komunikasi antara direktur pemeriksa internal dan direktur komite audit harus dijaga agar selalu harmonis dan intensif. Direktur komite audit harus meyakinkan kepada direktur pemeriksa internal bahwa tugasnya bukan menakuti orang, tetapi menguatkan perusahaan yang

secara tidak langsung melindungi seluruh karyawan. Pekerjaan yang dia lakukan tidak hanya mendapat dukungan dari komite audit, tetapi dari seluruh anggota organisasi (Allison 1994).

Komite audit harus menjaga komunikasi yang terbuka dengan pemeriksa internal, sehingga pemeriksa internal tersebut merasa bebas untuk mengemukakan permasalahan yang ditemui selama proses pemeriksaan. Komite harus menaruh perhatian atas kemungkinan pemeriksa internal tidak bisa menjalankan fungsinya dengan seksama karena adanya tekanan dan intimidasi dari manajemen. Menurut Al Katz (1998) komite audit bisa melakukan hal tersebut dengan beberapa cara. Komite bisa mengundang aparat pemeriksa internal untuk mengemukakan permasalahan yang dia hadapi serta pandangan-pandangannya pada saat dilakukan rapat komite audit, tanpa kehadiran personil perusahaan yang lain. Komite harus selalu memberikan jaminan kepada pemeriksa internal bahwa komite sepenuhnya mendukung tugasnya. Selain itu komite juga harus mengingatkan pemeriksa internal untuk menjalankan tugasnya secara kompeten, adil dan bertanggung jawab.

Jika uraian di atas menggambarkan hubungan komite dengan internal auditor secara normatif, berikut ini akan diberikan contoh empiris hubungan antara kedua pihak tersebut. Price Waterhouse menyatakan bahwa komite audit harus memeriksa proses penyusunan laporan keuangan interim. Meskipun rekomendasi ini juga telah dibuat oleh Treadway Commission, kurang dari 50% komite audit yang melakukan hal ini (Corporate Board, March/April 1994). Kemampuan dan motivasi komite untuk menjadi penengah konflik antara auditor dan manajemen turun, yang menyebabkan auditor sering berada pada posisi yang lemah. Banyak kritik yang mengatakan bahwa perusahaan cenderung untuk memilih *outside directors* yang tidak mempunyai kekuatan untuk menekan manajemen (Dentzer 1985, Baum 1986 dan Bennett 1986). Akibatnya komite audit yang seharusnya mengawasi aktivitas manajemen, bisa berbalik manajemenlah yang menggunakan komite tersebut sebagai alat untuk mewujudkan keinginannya.

Hubungan yang Harmonis dengan Akuntan Publik

Sebagaimana halnya hubungan komite dengan pemeriksa internal, komite harus mengusahakan terjadinya situasi dimana akuntan publik merasa bebas dalam menjalin komunikasi dengannya. Dalam hal ini, komite juga berfungsi ganda baik sebagai pihak yang langsung membantu tugas akuntan publik selama proses pemeriksaan maupun dalam menghadapi berbagai ketegangan yang timbul antara akuntan publik dengan manajemen. Selain itu komite juga harus selalu mengawasi agar akuntan publik melaksanakan tugasnya secara profesional (Al Katz 1998)

Dalam hubungannya dengan akuntan publik, komite harus

- meminta auditor untuk menyatakan ketepatan prinsip akuntansi dan praktik penerapan *disclosure* yang dilakukan manajemen;
- meminta auditor untuk menyatakan apakah pemilihan prinsip akuntansi yang dilakukan manajemen bersifat konservatif, moderat atau ekstrim
- memahami logika auditor dalam menentukan ketepatan pemilihan prinsip akuntansi dan metode *disclosure* yang dilakukan manajemen;
- memahami logika auditor dalam menerima prakiraan yang signifikan yang dilakukan oleh manajemen;
- diskusi dengan auditor bagaimana perusahaan memilih prinsip akuntansi dan metode *disclosure* yang mungkin mempengaruhi pemegang saham dan pandangan masyarakat terhadap perusahaan
- review atas *fee* yang diberikan kepada auditor untuk menjamin ketepatannya dengan jasa yang diberikan (Lee 1996).

Sehubungan dengan point terakhir, Price Waterhouse juga menyarankan dilakukan pengendalian *fee* auditor (*management fee*), untuk meningkatkan independensi akuntan publik. *Fee* audit yang tinggi tidak akan menjamin kualitas. Adanya saran bahwa untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan, gaji atau *fee* ditingkatkan nampaknya saran yang kurang tepat. Hal ini bukan berarti harus diusahakan biaya yang seminimum mungkin. Yang menjadi ukuran adalah *cost* dan *benefit*. Untuk menentukan tingkat *fee* yang efektif tidak mudah. Banyak perusahaan besar di Amerika yang menyerahkan *management fee* ini kepada pihak luar (Houck 1994).

Evaluasi

Faktor primer yang kelima ini mencakup dua hal. Pertama adalah ruang lingkup evaluasi yang dilakukan, dan kedua adalah siapa yang akan melakukan evaluasi tersebut. Adapun ruang lingkup evaluasi tersebut mencakup: evaluasi seberapa besar komite menjalankan tugasnya; apakah tanggung jawab yang diberikan tersebut perlu direvisi; bagaimana hubungan komite dengan internal dan eksternal auditor; seberapa besar anggota komite memahami berbagai topik penting seperti pelaporan keuangan atau perkembangan teknologi dengan pemeriksaan; apakah perlu dilakukan *training* untuk meningkatkan kemampuannya; berapa kali frekuensi pertemuan yang diperlukan; serta masalah evaluasi efektivitas *meeting* yang sudah dilakukan.

Masalah yang kedua adalah siapa yang harus melakukan evaluasi tersebut. Al Katz (1998) mendukung bahwa evaluasi tersebut sebaiknya dilakukan oleh komite audit sendiri (*self assessment*). Pendapat ini juga didukung oleh Price Waterhouse. Price Waterhouse merekomendasikan bahwa komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya. Komite Audit harus bekerja sama dengan manajemen, direktur pemeriksa internal, akuntan publik, dan mereview hasil evaluasi tersebut dengan seluruh anggota dewan komisaris (Corporate Board, March/April 1994). Penulis

berpendapat, *self assessment* tersebut nampaknya sangat subyektif hasilnya. Bagaimanapun seseorang mempunyai kecenderungan untuk menilai baik dirinya sendiri. Selain melalui *self assessment* pihak lain seperti manajemen, akuntan publik perusahaan, internal auditor bisa juga melakukan proses tersebut, tetapi nampaknya pihak tersebut juga diragukan independensinya. Karena ketiga pihak tersebut adalah pihak yang kinerjanya diawasi oleh komite tersebut. Alternatif ketiga adalah meminta jasa kantor akuntan yang independen, yang bukan akuntan publik perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Sommer (1991) yang menyatakan bahwa auditor mempunyai posisi strategis untuk mengevaluasi kinerja komite audit, karena dialah pihak yang banyak bergaul dengan berbagai komite audit suatu perusahaan. Alternatif ketiga ini nampaknya paling bisa diterima, sebagaimana halnya dengan evaluasi kinerja akuntan publik, yang menerapkan *peer review* (evaluasi kinerja suatu kantor akuntan publik oleh kantor akuntan publik yang lain). Meskipun demikian, alternatif evaluasi pertama dan kedua perlu juga dilakukan, sebagai pelengkap evaluasi oleh pihak independen.

Frekuensi yang bisa dilakukan atas pelaksanaan evaluasi tersebut tergantung stabilitas komite tersebut serta berbagai pertimbangan personalitas masing-masing anggotanya. Jika anggota komite sering berganti, diperlukan proses evaluasi yang lebih sering lagi. Menurut penulis, *self assessment* tersebut bisa dilakukan dua kali setahun. Sedangkan evaluasi oleh akuntan publik yang independen dilakukan tiga tahun sekali, sebagaimana *peer review*.

FAKTOR SEKUNDER: FORMAL DAN INFORMAL MEETING

Menurut Lipman (1996), pertemuan formal yang diselenggarakan komite audit merupakan hal penting bagi kesuksesan komite tersebut. Dalam tulisan ini penulis berpendapat bahwa pertemuan formal tersebut (*meeting*) merupakan faktor sekunder. Hal tersebut dikarenakan faktor ini sifatnya hanya memperkuat keenam faktor di atas. Pertemuan ini bisa diselenggarakan untuk membahas keenam faktor tersebut, mengevaluasi kualitasnya, jika perlu mengadakan perbaikan dan perubahan yang diperlukan

Frekuensi dan isi pertemuan yang dilakukan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite. Selain itu, jumlah pertemuan yang dilakukan biasanya ditentukan oleh ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite. Tetapi pada umumnya komite bersidang 2-3 kali setahun. Sidang tersebut diselenggarakan : 1) sebelum dilakukannya audit tahunan; 2) sesudah pelaksanaan audit dan sebelum laporan keuangan dikeluarkan; dan 3) sebelum rapat umum pemegang saham tahunan. Selain pertemuan yang bersifat formal tersebut, komite secara reguler harus berkomunikasi dengan manajemen, akuntan publik serta internal auditor.

Dari berbagai pertemuan tersebut, harus diselenggarakan pertemuan yang menyertakan manajemen dan akuntan (internal dan eksternal). Forum ini diselenggarakan untuk membicarakan persoalan yang tidak bebas dikemukakan dengan kehadiran pihak lain. Biasanya agenda pertemuan yang dilakukan mencakup: 1) review atau rekomendasi persetujuan atas laporan keuangan tahunan; 2) review luas pemeriksaan yang dilakukan akuntan publik ; 3) review dan menyetujui rencana pemeriksaan internal; 4) review laporan struktur pengendalian intern perusahaan; 5) evaluasi kinerja akuntan publik dan menentukan nominasi calon akuntan publik tahun mendatang; serta 6) review berbagai standar atau aturan baru yang dikeluarkan oleh berbagai badan yang berwenang. Biasanya direktur komite yang menyusun agenda ini, dengan menerima masukan dari manajemen, akuntan internal, dan akuntan publik. Berbagai agenda yang harus dibicarakan bisa diselenggarakan melalui pertemuan yang bersifat formal (biasanya dua atau tiga kali tiap tahun) maupun bersifat informal (jadwal tidak mengikat, yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan).

PENUTUP

Sebagaimana dinyatakan di atas, ide penulisan ini berawal dari artikel yang ditulis oleh Al Katz (1998). Menurut penulis, apa yang dikemukakan oleh Al Katz tersebut belum mencakup faktor yang lebih fundamental dibanding kelima faktor yang diusulkan. Selain itu, penulis juga menambahkan faktor sekunder yang bisa melengkapi kesuksesan komite. Meskipun artikel dan berbagai penelitian empiris yang menjadi acuan penulis dalam konteks kondisi di Amerika, tetapi esensi tulisan ini bisa diterapkan di Indonesia, meskipun dengan berbagai penyesuaian. Karena Indonesia belum lama menerapkan konsep komite audit ini, nampaknya apa yang dipraktikkan di sana bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kita bisa menerapkan hal tersebut untuk mengefektifkan keberadaan komite audit di Indonesia, dengan bercermin pada kesuksesan dan kegagalan praktik yang telah lama terjadi di negara lain. *Experience is the best teacher*. Jangan sampai kita terantuk batu yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Katz, Eugene, "Keys to Effective Audit Committee." *Credit World*, (Maret/ April hal. 21-23.
- Allison JR, Dwight L., (1994), "Internal Auditor and Audit-Committee." *Internal Auditor*, hal. 50-55.
- Beasley, Mark S., (1996), "An Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Fraud." *The Accounting Review*, hal. 443-465.

- Houck, Thomas P., (1994), "How to Evaluate Your Audit Committee Performance." *Directorship*, hal. 4-7.
- Jadick, Theodore, (1994), "Board Committee Trends." *Corporate Board*, hal. 7-10.
- Knapp, Michael C., (1987), "An Empirical Study of Audit Committee Support for Auditor Involved in Technical Disputes with Client Management." *The Accounting Review*, hal. 578-588.
- Kurnianingsih, R., dan Bambang Supomo, (1999), "Peran, Komposisi dan Kinerja Komite Audit." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, hal. 149-155.
- Lear, Robert, (1996), "The Decline of The Audit Committee." *Chief Executive*, hal. 10.
- Lee, Jerry D. "Chairing The Audit Committee A Guide." *Directorship* (Februari hal. 2-4.
- Lipman, Frederick, (1996), "Audit Committee Meetings A Primer." *Directorship* hal. 4-6.
- McMullen, Dorothy A. dan Raghunandan, (1996), "Enhancing Audit Committee Effectiveness." *Journal of Accountancy*, hal. 79-81.
- McMullen, Dorothy Ann., (1996), "Audit Committee Performance: An Investigation of the Consequences Associated with Audit Committee." *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, hal. 87-103.
- Scarbrough, D. Paul et al., (1998), "Audit Committee Composition and Interaction with Internal Auditor: Canadian Evidence." *Accounting Horizons*, hal. 51-62.
- "Study Shows Best Practice for Audit Committee." *Corporate Board*, Maret/April, 1994.
- Sommer, A.A., (1991), "Auditing Audit Committee: An Educational Opportunity for Auditors." *Accounting Horizons*, hal. 91-93.
- Vicknair, David. et al., (1993), "A Note on Audit Committee Independence: Evidence from the NYSE on "Grey" Area Directors." *Accounting Horizons*, hal. 53-57.